



BADAN POM

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN
DI SANGGAU



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SANGGAU

NOMOR HK 02.02.27B.12.25.162 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SANGGAU

TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SANGGAU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Sanggau tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan Sanggau Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI SANGGAU TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI SANGGAU TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai POM di Sanggau Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai POM di Sanggau memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Sanggau untuk

mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Ketiga : Renstra Balai POM di Sanggau sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai POM di Sanggau dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Sanggau.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau

pada tanggal : 05 Desember 2025

Kepala Balai POM di Sanggau



ERIK BUDIANTO TAMPUBOLON

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Salam Sejahtera, Shalom, Namo Buddaya, Salam Kebajikan

Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata



Rencana Strategis Balai POM di Sanggau 2025 - 2029 merupakan rencana lima tahun yang mengacu pada RENSTRA Badan POM 2025 - 2029. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP.

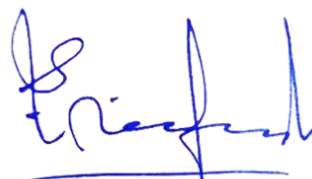
Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menuntut Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sanggau untuk melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi Badan POM.

Renstra Balai POM di Sanggau disusun untuk mendukung program dan kegiatan Badan POM. Renstra memuat visi, misi, sasaran, tujuan strategi kegiatan yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 2025-2029. Dalam Renstra Balai POM di Sanggau 2025-2029 telah ditetapkan 11 Sasaran Kegiatan dan 23 Indikator Kinerja Utama serta kerangka pendanaannya. Renstra tersebut merupakan pedoman bagi Balai POM di Sanggau dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan Renstra Balai POM di Sanggau. Besar harapan kami agar Rencana Strategis Balai POM di Sanggau Tahun 2025-2029 yang telah disusun dapat memberikan manfaat bagi pencapaian visi, misi, serta tujuan Badan POM.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KEPALA BALAI POM DI SANGGAU



Erik Budianto Tampubolon

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan yang sejalan dengan agenda reformasi pembangunan nasional di bidang kesehatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sanggau menyusun perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan berbagai faktor strategis, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Penyusunan rencana tersebut dilakukan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh kebijakan dan strategi yang dirumuskan kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Sanggau Tahun 2025–2029 sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di masa mendatang.

Dalam lima tahun kedepan, pengawasan Obat dan Makanan akan menghadapi berbagai tantangan di antaranya: 1) Aspek kesehatan, yakni memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat atau khasiat, serta mutu; 2) Aspek sosial, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan yang beredar; 3) Aspek ekonomi, yaitu mendorong daya saing industri Obat dan Makanan melalui kemudahan proses perizinan dan sertifikasi dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan kehalalan produk, dukungan terhadap pengembangan produk baru, peningkatan ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, pencegahan penyelundupan dan peredaran produk ilegal atau palsu, serta perluasan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan; 4) Aspek keamanan nasional, yaitu memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran atau kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang termasuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan, seperti bioterorisme; dan 5) Aspek teknologi, yaitu meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi guna menghadapi tren peredaran produk secara daring di era Revolusi Industri 4.0.

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Balai POM di Sanggau sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Balai POM di Sanggau untuk periode 2025-2029. Renstra Balai POM di Sanggau disusun dengan berpedoman pada Renstra Badan POM.

Balai POM di Sanggau sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan POM memiliki tanggung jawab dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan dan pertumbuhan usaha di bidang Obat dan Makanan yang cukup pesat serta maraknya peredaran Obat dan Makanan secara

daring menuntut Balai POM di Sanggau harus memiliki strategi dalam melaksanakan pengawasan dan memastikan keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar. Wilayah kerja Balai POM di Sanggau yang mencakup 5 (lima) Kabupaten yakni Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu, dimana wilayah kerja Balai POM di Sanggau tersebut merupakan salah satu pintu masuk utama Provinsi Kalimantan Barat yang berpeluang menyebabkan masuknya produk obat dan makanan ilegal atau tidak memenuhi ketentuan.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidaklah dapat dilakukan oleh Badan POM sendiri, namun dibutuhkan sinergitas dari pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. Untuk itulah Balai POM di Sanggau berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) dengan melibatkan lintas sektor dan stakeholder terkait.

Dalam rangka penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam pengawasan Obat dan Makanan sebagai pelaksanaan dari Keputusan Kepala BPOM Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Sanggau telah menerapkan implementasi 14 Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial yang meliputi kegiatan Keputusan/ Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh Balai POM di Sanggau, Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Balai POM di Sanggau, Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Balai POM di Sanggau, Sarana Pengawasan Obat dan Makanan serta UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Balai POM di Sanggau.

Oleh karena itu, Balai POM di Sanggau sebagai salah satu unit pelaksana teknis Pengawas Obat dan Makanan, berkomitmen untuk terus mengembangkan strategi yang mendukung kesetaraan gender dalam kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di wilayah kerja Balai POM di Sanggau.

Wilayah kerja Balai POM di Sanggau yang meliputi 5 kabupaten, 3 diantaranya merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini berpotensi menyebabkan tingginya peredaran produk ilegal, di samping juga peredaran produk obat dan makanan secara daring yang semakin marak menyebabkan pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Sanggau harus lebih komprehensif. Perkembangan UMKM di wilayah kerja Balai POM di Sanggau juga menuntut memiliki strategi khusus yang dapat meningkatkan daya saing peningkatan mutu dan keamanan pangan-pangan Balail untuk menjadi tuan rumah sendiri di negaranya

Luas Tanah Balai POM di Sanggau berdiri di atas tanah seluas 2.100 m² beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 25 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau milik Badan POM sendiri. Balai POM di Sanggau memiliki bangunan kantor seluas 1.500 m² yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 25 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau milik Badan

POM sendiri Berdasarkan Berita Acara Serah Terima No . Tanah Balai POM di Sanggau belum memiliki sertifikat sendiri namun memiliki Berita Acara Serah Terima Alih Status Penggunaan Nomor 04.1/BA/SJ/2020 tanggal 30 April 2020. Balai POM di Sanggau berubah klasifikasi menjadi Balai POM di Sanggau berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Renstra ini, Balai POM di Sanggau mengacu pada Peraturan Badan POM No 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2025-2029.

PERAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Badan POM sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang diatur dalam peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Balai POM di Sanggau mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Balai POM di Sanggau menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dilihat dari fungsi Balai POM di Sanggau sebagai UPT BADAN POM secara garis besar, terdapat 5 (lima) inti kegiatan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) dengan melaksanakan audit dalam rangka sertifikasi sarana produksi pangan, kosmetik dan obat tradisional dalam penerapan CDOB, CPKB, CPPOB dan CPOTB;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) mencakup: pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan sampel, pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
5. Pengujian di bidang Obat dan Makanan untuk memastikan keamanan, mutu, dan manfaat dari Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai POM Kabupaten Sanggau sebagai garda terdepan dalam hal perlindungan terhadap masyarakat di wilayah kerja Balai POM di Sanggau. Oleh karena itu, sebagai UPT Badan POM di daerah sangat penting untuk diperkuat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia, serta sarana prasarana pendukung seperti sistem teknologi dan informasi dan sarana pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Balai POM di Sanggau adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pemeriksaan

Tugas :

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana /fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh produk obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan inspeksi sarana/ fasilitas produksi dan distribusi Obat dan makanan dan sarana /fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan distribusi produk obat dan makanan;
- d. Pelaksanaan pengambilan contoh (Sampling) Obat dan makanan;
- e. pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta

sertifikasi dan sampling produk obat dan makanan.

Bidang pemeriksaan terdiri atas :

- (1). Seksi Inspeksi yang bertugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
- (2). Seksi Sertifikasi yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi dalam rangka mengeluarkan sertifikat izin penerapan / rekomendasi sertifikat sarana/fasilitas produksi dan/ atau distribusi dan produk Obat dan Makanan, serta melakukan pendampingan terhadap sarana UMK dalam rangka sertifikasi

2. Fungsi Penindakan

Tugas:

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program cegah tangkal, siber, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal, siber, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

3. Fungsi Informasi dan Komunikasi

Tugas:

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

- e. Pelaksanaan kegiatan mobil laboratorium keliling.

4. Fungsi Tata Usaha

Tugas :

Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Fungsi Keuangan;
- b. Fungsi Umum;

Fungsi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Fungsi Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

5. Fungsi Pengujian

Tugas:

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian Obat dan Makanan.

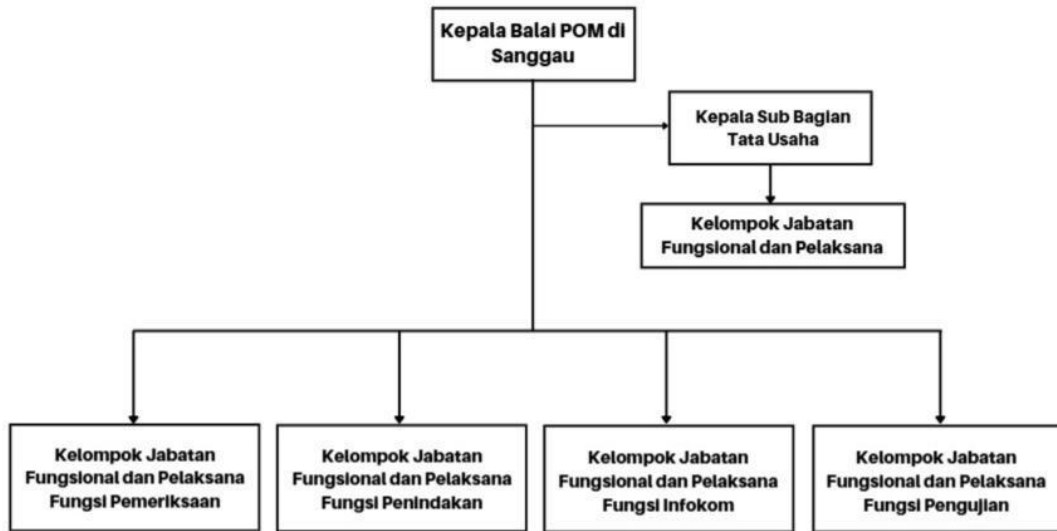
Fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian Obat dan Makanan
- b. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian Obat dan Makanan.

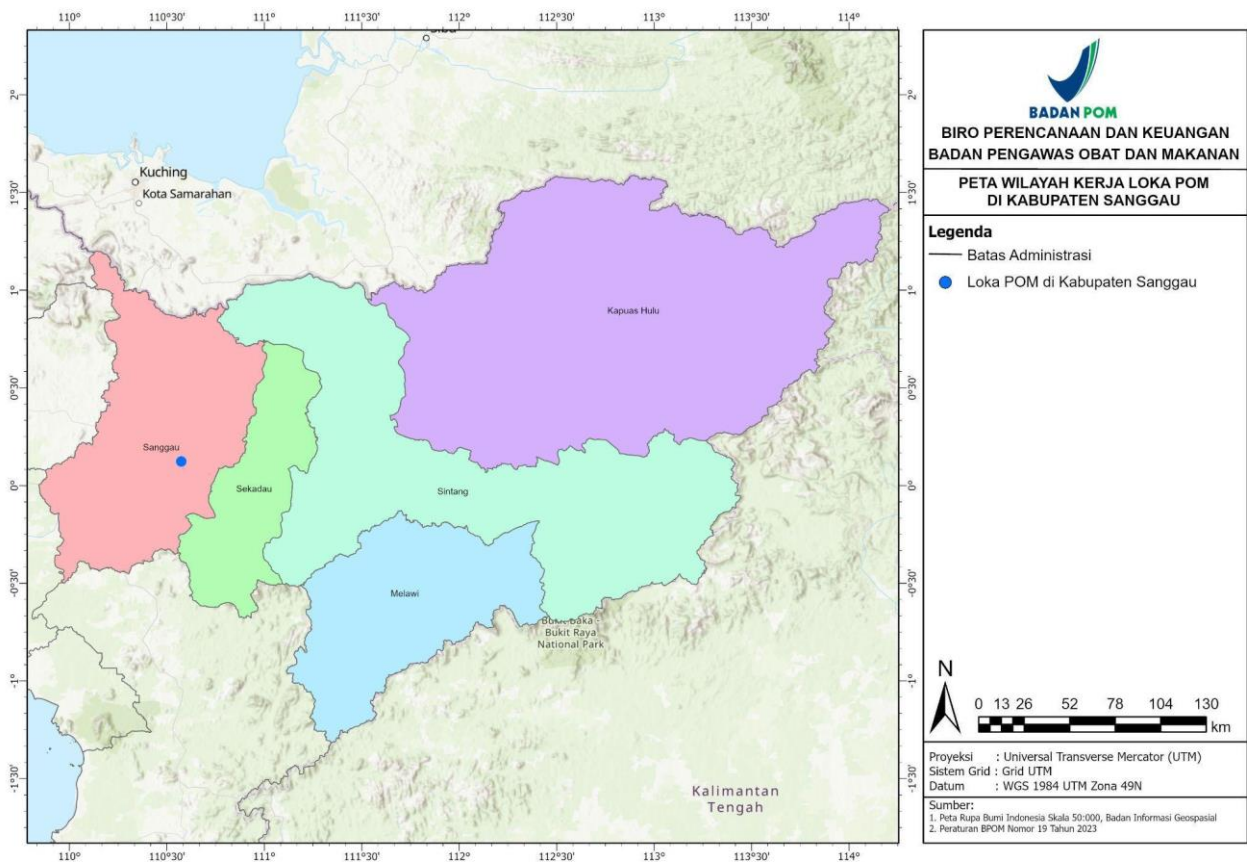
STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Sanggau telah berubah klasifikasinya menjadi Balai POM di Sanggau. Perubahan ini mulai berlaku setelah pengukuhan yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2025,

struktur organisasi Balai POM di Sanggau sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Sanggau



Gambar 2. Wilayah kerja Balai POM di Sanggau

1. Luas Wilayah Kerja dan Jumlah Penduduk

Balai POM di Sanggau memiliki luas wilayah kerja 82.728,14 km² yang terdiri atas dua kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

- Kabupaten Sanggau seluas 12.857,70 km² dengan 15 kecamatan, 159 desa dan 6 kelurahan.
- Kabupaten Sekadau seluas 6.273,39 km² dengan 7 kecamatan, 94 desa dan 0 kelurahan.
- Kabupaten Sintang seluas 21.638 km² dengan 14 kecamatan, 391 desa dan 16 kelurahan.
- Kabupaten Melawi seluas 10.640,80 km² dengan 11 kecamatan, 169 desa dan 0 kelurahan.
- Kabupaten Kapuas Hulu 31.318,25 km² dengan 23 kecamatan, 278 desa dan 4 kelurahan.

Tabel 1. Data Wilayah Kerja Balai POM di Sanggau

NO	KABUPATEN	Data Umum			Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)
		Kecamatan	Desa	Kelurahan		
1	Sanggau	15	159	6	503.937	12.857,70
2	Sekadau	7	94	0	222.510	6.273,39
3	Sintang	14	391	16	438.022	21.638,00
4	Melawi	11	169	0	239.502	10.640,80
5	Kapuas Hulu	23	278	4	262.000	31.318,25
	Jumlah	70	1091	26	1.655.971	82.728,14

Sumber: Data Badan Pusat Statistik 2024

CAPAIAN KINERJA

Balai POM di Sanggau merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Balai Koordinator yakni Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sejak tahun 2018 – 2021, pada tahun 2022 Balai POM di Sanggau telah menjadi satker mandiri dimana proses administrasi dan keuangannya dilakukan pengelolaan secara mandiri dan terpisah dari Balai Koordinator.

Adapun capaian kinerja Balai POM di Sanggau pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Capaian Kinerja Balai POM di Sanggau Tahun 2022-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	(2022)		(2023)		(2024)		Capaian Kinerja Pada Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase	Kategori
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kab. Sanggau	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Persentase	90,50	76,33	91,50	89,51	92,50	94,20	101,8	Sangat Baik
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Persentase	88,00	89,62	89,50	88,31	91,00	96,03	105,5	Sangat Baik
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persentase	79,00	69,70	83,00	89,66	89,70	96,30	107,4	Sangat Baik
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persentase	88,00	95,65	89,00	83,33	88,10	93,62	106,3	Sangat Baik
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Persentase	-	-	97,60	100,00	98,00	93,33	95,2	Baik
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kab. Sanggau	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Persentase	91,00	93,96	93,00	100,00	95,00	100,00	105,3	Sangat Baik
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase	65,00	75,00	70,00	90,63	100,00	100,00	100,0	Sangat Baik
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Persentase	91,00	100,00	94,00	100,00	100,00	100,00	100,0	Sangat Baik
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase	78,00	41,67	82,00	85,71	86,00	89,29	103,8	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	(2022)		(2023)		(2024)		Capaian Kinerja Pada Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase	Kategori
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	Persentase	79,00	83,33	82,00	79,13	85,00	88,46	104,1	Sangat Baik
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Persentase	77,00	100,00	79,00	100,00	100,00	100,00	100,0	Sangat Baik
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten /Kota	Persentase	-	-	-	-	95,00	95,00	100,0	Sangat Baik
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kab. Sanggau	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	Indeks	90,90	91,35	91,80	95,41	96,30	97,92	101,7	Sangat Baik
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kab. Sanggau	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase	50,00	50,00	50,00	60,00	50,00	50,00	100,0	Sangat Baik
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase	50,00	50,00	50,00	60,00	50,00	50,00	100,0	Sangat Baik
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kab. Sanggau	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Persentase	92,00	100,00	94,00	100,00	100,00	100,00	100,0	Sangat Baik
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kab.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Kab. Sanggau	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	(2022)		(2023)		(2024)		Capaian Kinerja Pada Tahun 2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Persentase	Kategori
Sanggau yang optimal	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Balai POM Kab. Sanggau	Indeks	-	-	82,20	71,81	74,29	75,55	101,7	Sangat Baik
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Indeks	70,00	65,00	70,00	83,29	83,29	90,35	108,5	Sangat Baik
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Indeks	-	-	82,39	92,44	93,00	95,45	102,6	Sangat Baik
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Indeks	2,25	2,00	2,50	3,00	3,00	3,00	100,0	Sangat Baik
Terkelolanya keuangan Balai POM di Kab. Sanggau secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Nilai Rerata	90,60	91,42	91,80	91,59	91,61	92,38	100,8	Sangat Baik
	Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	70,00	30,00	70,00	100,00	98,96	100,00	101,1	Sangat Baik
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nilai	40,00	84,00	84,00	97,56	89,00	77,79	87,4	Cukup Baik
	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	Presentase	-	-	-	-	60,00	94,93	158,2	Sangat Baik
Terwujudnya SDM Balai POM di Kab. Sanggau yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Kab. Sanggau	Indeks	84,20	85,00	84,30	89,64	89,62	86,33	96,3	Baik

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2024, sebagian besar telah sesuai bahkan melebihi target

dari masing-masing indikator kinerja, namun terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Berikut pembahasan capaian kinerja Balai POM di Sanggau.

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Sanggau.

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat di Loka POM di Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 berada di atas target yang ditetapkan dengan kriteria sangat baik. Tercapainya realisasi persentase obat yang memenuhi syarat dengan kategori sangat baik dapat menunjukkan bahwa produk obat dan makanan yang beredar di wilayah Loka POM di Kab Sanggau dari segi label serta pengujian merupakan produk yang memenuhi ketentuan. Metode sampling secara acak dilakukan untuk menggambarkan kondisi sampel di lapangan, dimana sampel dilakukan dengan pengambilan acak sesuai dengan pedoman sampling yang ditetapkan. Kegiatan pengambilan sampel sesuai dengan rencana pelaksanaan serta monitoring secara berkala menjadi salah satu penyebab keberhasilan dalam kinerja persentase obat yang memenuhi syarat. Serta dalam pengelolaan, pengiriman dan penyimpanan sampel yang baik, sehingga mampu mempertahankan kualitas sampel dengan baik

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 berada di atas target yang ditetapkan dengan kriteria sangat baik. Tercapainya realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat dengan kategori sangat baik dapat menunjukkan bahwa produk obat dan makanan yang beredar di wilayah Loka POM di Kab Sanggau dari segi label serta pengujian merupakan produk yang memenuhi ketentuan. Metode sampling secara acak dilakukan untuk menggambarkan kondisi sampel di lapangan, dimana sampel dilakukan dengan pengambilan acak sesuai dengan pedoman sampling yang ditetapkan. Kegiatan pengambilan sampel sesuai dengan rencana pelaksanaan serta monitoring secara berkala menjadi salah satu penyebab keberhasilan dalam kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat. Serta dalam pengelolaan, pengiriman dan penyimpanan sampel yang baik, sehingga mampu mempertahankan kualitas sampel dengan baik.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Loka POM di Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 berada di atas target yang ditetapkan. Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu dengan kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan sampling dilakukan sesuai pedoman sampling dan pengujian obat dan hasil pengujian. Hal ini juga menunjukkan bahwa produk obat yang beredar di wilayah Loka POM di Kab Sanggau berdasarkan sampling secara targeted dengan kriteria tertentu merupakan produk yang aman dan bermutu. Serta dalam pengelolaan, pengiriman dan penyimpanan sampel yang baik, sehingga mampu mempertahankan kualitas sampel dengan baik.

4. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Realisasi Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Loka POM di Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu dengan kategori sangat baik. Hal ini dikarenakan sampling dilakukan sesuai pedoman sampling dan pengujian obat dan hasil pengujian. Hal ini juga menunjukkan bahwa produk obat yang beredar di wilayah Loka POM di Kab Sanggau berdasarkan sampling secara targeted dengan kriteria tertentu merupakan produk yang aman dan bermutu termasuk terhadap produk UMKM yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kab Sanggau. Serta dalam pengelolaan, pengiriman dan penyimpanan sampel yang baik, sehingga mampu mempertahankan kualitas sampel dengan baik.

5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan di Loka POM di Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 belum memenuhi target awal yang telah ditetapkan, yaitu 95,23 %. Hasil ini termasuk kategori “**Cukup**”. Hal ini disebabkan oleh adanya 1 sampel pangan fortifikasi tepung terigu yang hasil pengujiannya tidak memenuhi syarat yaitu pada parameter uji PK vitamin B9 (asam folat).

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai POM di Sanggau

Sasaran Kegiatan 2 terdiri dari 7 (tujuh) indikator dimana pada tahun 2024 capaian semua indikator sudah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan obat dan makanan dan pelayanan publik di Balai POM Sanggau sudah berjalan efektif. Hal ini menjadi evaluasi untuk penetapan target indikator pada tahun selanjutnya.

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Loka POM di Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 telah memenuhi target awal yang telah ditetapkan, yaitu 100% dengan capaian 105,26 % dengan kategori **sangat baik**. Indikator kinerja ini terdiri dari 4 keputusan atau rekomendasi dimana Loka POM Sanggau memiliki capaian di Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat ditindaklanjuti oleh UPT.

Faktor yang menjadi penunjang keberhasilan capaian indikator adalah telah dilaksanakan penelusuran kasus obat dan makanan yang ditarik selama tahun 2024, serta telah dibuat rekapitulasi data hasil penelusuran kasus. Sehingga petugas mudah untuk menindaklanjuti surat penarikan ataupun tindak lanjut terhadap produk yang dikirimkan oleh pusat

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

oleh pemangku kepentingan telah terealisasi dengan baik. Hasil inpeksi yang telah dilakukan seluruhnya sudah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dalam Bentuk pelaporan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan. Petugas telah melakukan reminder dan sosialisasi kepada pelaku usaha ketika melakukan pemeriksaan rutin. Bahwa wajib menindaklanjuti masukan petugas atas temuan hasil pemeriksaan. Serta telah dilakukan Desk CAPA secara langsung kepada pelaku usaha yang belum menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil pemeriksaan UPT di wilayah sanggau, dan melakukan penelusuran kasus terhadap sarana yang belum menindaklanjuti CAPA

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu oleh Loka POM di Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 telah memenuhi target awal yang telah ditetapkan, yaitu 120 % dengan kategori **Sangat Baik**. Target pemenuhan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Loka POM di Kabupaten Sanggau tahun 2024 adalah 2 (dua) keputusan dan telah terealisasi. Terhadap 2 (dua) UMK yang telah mendapatkan IP-CPPOB telah dilakukan pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerapan CPPOB oleh sarana UMK. Berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor PR.09.03.2.01.25.42 tanggal 15 Januari 2025, Target Indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu semula 100% menjadi 120%. Pencapaian ini disebabkan karena kesadaran sarana yang mengajukan permohonan penilaian sarana dalam rangka verifikasi Izin Penerapan CPPOB kepada Loka POM di Kabupaten Sanggau telah berjalan dengan baik serta peran aktif petugas yang mendorong dalam keberhasilan pendampingan sarana dalam rangka pendaftaran izin edar pangan olahan ataupun sertifikasi CPPOB/CPKB/CPOTB bertahap.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan terealisasi dengan kategori sangat baik. Pemeriksaan dilakukan terhadap sarana MD, sarana IRTP serta sarana Usaha kecil obat tradisional (UKOT) dimana hasil pemeriksaan sebagian besar menunjukkan hasil memenuhi ketentuan, dimana sarana produksi telah menerapkan cara produksi pangan yang baik di sarana produksi pangan baik pangan olahan, industri rumah tangga pangan serta cara produksi obat tradisional yang baik. Selain itu, pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan renlak, petugas juga selalu melakukan sosialisasi dan pembinaan termasuk saat melakukan kegiatan pemeriksaan.

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan terealisasi dengan kategori sangat baik. Pemeriksaan dilakukan terhadap sarana pelayanan kefarmasian yang terdiri Instalasi farmasi kabupaten, rumah sakit, apotek, toko obat, klinik dan puskesmas serta sarana distribusi pangan, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sarana pelayanan kefarmasian maupun sarana distribusi telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan. Terdapat beberapa temuan administratif yang perlu diperbaiki kedepannya dan menjadi masukan agar petugas tetap melakukan sosialisasi terkait pengelolaan obat

di sarana pelayanan kefarmasian maupun cara distribusi obat dan makanan yang baik kepada pelaku usaha

6. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan dan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di kab/kota terealisasi dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kab Sanggau selalu melakukan kegiatan koordinasi dalam rangka pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah kerja Loka POM di Kab Sanggau. Loka POM di Kab Sanggau juga turut terlibat dalam kegiatan percepatan penurunan stunting dengan terlibat memberikan komunikasi informasi dan edukasi ke berbagai kalangan masyarakat mulai dari ibu PKK hingga anak sekolah serta calon pengantin di KUA Kab Sanggau. Loka POM di Kab Sanggau juga turut terlibat dalam melakukan pemantauan pelaksanaan DAK non fisik POM kepada Kab Sanggau, Sekadau dan Melawi baik sebagai narasumber maupun fasilitator dalam pelaksanaan teknis kegiatan termasuk penganggaran.

7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di Loka POM di Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 100 % dan capaian sudah memenuhi target yang ditetapkan dan mendapatkan kriteria "Baik". Kegiatan pendampingan UMK pada tahun 2024 telah direalisasikan terhadap target UMK Pangan Olahan. Adapun keberhasilan capaian dipengaruhi karena kegiatan dilaksanakan sesuai dengan juknis pedoman pendampingan UMK Pangan Olahan, meliputi penetapan target, bimbingan teknis, fasilitasi dan pendampingan, coaching clinic e-sertifikasi dan e-registrasi, serta monev dan pelaporan. Sehingga pada tahap coaching clinic e-sertifikasi, telah diterbitkan IP-CPPOB sebagai output pada indikator ini.

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya Efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Sanggau

Sasaran Kegiatan 3 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang nilai capaiannya telah melampaui nilai 100% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Balai POM di Sanggau telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Namun, Persentase Capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Balai POM di Sanggau yang melebihi target menjadi evaluasi bagi Balai POM di Sanggau dalam menetapkan target KIE pada tahun berikutnya

1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

Audien di wilayah Loka POM di Kabupaten Sanggau mayoritas masih menggemari KIE yang disampaikan oleh narasumber secara lisan dan/atau langsung. Hal tersebut dirasa lebih mudah dipahami dan bermanfaat. Namun, luasnya wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sanggau serta

adanya wilayah perbatasan menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan kegiatan KIE secara langsung.

Berdasarkan hasil survei efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Sanggau tahun 2024, diperoleh capaian sebesar 101,68% dan capaian sudah memenuhi target yang ditetapkan dan mendapatkan kriteria “Sangat Baik”. Indeks 97,92 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media dan dinilai dari berbagai aspek. Kontribusi masing masing aspek adalah aspek ragam kegiatan 97,12; aspek pemahaman 98,97; aspek manfaat 98,12; dan aspek minat 96,15. Aspek pemahaman dan manfaat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indek efektivitas KIE. Hasil survei ini menjadi kajian dan masukan bagi Loka POM di Kabupaten Sanggau untuk melaksanakan KIE secara lebih sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas, majemuk, dan frekuensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Sanggau

Sasaran Kegiatan 4 terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Nilai capaian kedua indikator tersebut telah melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengambilan sampel yang dilakukan petugas Balai POM di Kab Sanggau telah sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan.

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap perencanaan yang telah disusun serta melakukan sampling sesuai dengan pedoman sampling merupakan penyebab keberhasilan kinerja persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar oleh Loka POM di Kabupaten Sanggau. Selain itu, pelaksanaan kegiatan sampling juga sudah sesuai dengan renlak.

2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap perencanaan yang telah disusun serta melakukan sampling sesuai dengan pedoman sampling merupakan penyebab keberhasilan kinerja persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar oleh Loka POM di Kabupaten Sanggau. Selain itu, pelaksanaan kegiatan sampling juga sudah sesuai dengan renlak.

Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sanggau

Sasaran Kegiatan 5 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan dimana nilai capaiannya telah melampaui target. Tahun 2024 Balai POM di Sanggau telah menyelesaikan satu kasus pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Pro Justitia yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan

dengan sebelumnya memperhatikan pola tindak lanjut. Balai POM di Sanggau dalam menjalankan tugasnya selalu mengedepankan kegiatan pembinaan, apabila setelah melalui tahap pembinaan tersebut, pelaku usaha masih melakukan pelanggaran, sebagai pilihan terakhir atau ultimatum remidium, akan dilakukan proses projustitia.

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja di Loka POM di Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 telah memenuhi target awal yang telah ditetapkan, yaitu 100% dengan kategori sangat baik. Tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sanggau telah melaksanakan Operasi Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan sebanyak 2 (dua) kali. Salah satu kasus ditindaklanjuti dengan Pro Justitia. Proses kemajuan perkara Tahun 2024 sudah sampai Tahap II pada bulan Desember 2024. Perencanaan penyelidikan yang berkesinambungan dimulai dari pengumpulan bahan keterangan, pendalaman informasi, operasi penindakan dan proses pemberkasan disertai dengan pengendalian, monitoring dari perencanaan hingga evaluasi hasil merupakan faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target.

Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sanggau yang optimal

Sasaran Kegiatan 6 terdiri dari 3 (tiga) indikator dimana ketiga indikator tersebut capaiannya telah mencapai target yang ditetapkan. Indikator pertama yaitu Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT, dengan capaian 100%. Nilai AKIP UPT dengan capaian 101,69%. Dan yang terakhir adalah Nilai pengelolaan kearsipan dengan capaian 108,48%. Capaian pada 3 indikator tersebut terlihat meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan perencanaan dan kegiatan yang dilakukan terhadap pencapaian target sudah baik.

1. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT

Realisasi Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT di Loka POM di Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 telah sesuai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa rencana aksi RB yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sanggau telah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Hal yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target pada indikator ini yaitu komitmen kepala UPT dan pegawai terhadap implementasi RB dilingkungan Loka POM di Kab Sanggau.

Persentase capaian kinerja implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT Loka POM di Kabupaten Sanggau yang sudah mencapai target di tahun ini selanjutnya akan dipertahankan dengan baik untuk mencapai target rencana aksi RB pada tahun selanjutnya.

2. Nilai AKIP UPT

Loka POM di Kabupaten Sanggau telah mencapai target pada tahun 2024 dengan nilai 75,55. Hal ini dikarenakan dalam pelaporannya sudah dilakukan secara optimal terhadap seluruh komponen penilaian AKIP. Loka POM di Kabupaten Sanggau telah juga melakukan evaluasi terhadap saran

perbaikan AKIP tahun 2023. Selain itu telah ditetapkan pic dan dilakukan monitoring terhadap kelengkapan data secara rutin.

3. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Realisasi Persentase Nilai Pengelolaan Kearsipan di Loka POM di Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 Telah melampaui target. Hal ini dikarenakan pengelolaan kearsipan dilakukan dan direncanakan dengan baik. Serta telah dilakukan pra-desk audit kearsipan sehingga diperoleh masukan yang perlu dilengkapi oleh Loka POM di Kabupaten Sanggau untuk segera ditindaklanjuti.

Sasaran Kegiatan 7. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan 7 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT. Indikator ini mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 102,63%. Capaian ini meningkat dari realisasi tahun sebelumnya, menunjukkan kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian target sudah efektif.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT

Dari hasil survey Kepuasan Masyarakat dari tahun 2022 - 2024 terlihat bahwa terjadi peningkatan indeks kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut diukur baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja Loka POM di Kabupaten Sanggau dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian tersebut, antara lain :

- a. Kemudahan akses informasi yang benar tentang Obat dan Makanan oleh masyarakat melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang, dan media sosial
- b. Kepastian respon dan tindak lanjut yang dilakukan atas pengaduan masyarakat terkait Obat dan Makanan
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan secara rutin serta secara intensif menjelang perayaan hari raya.
- d. Kompetensi petugas yang terus ditingkatkan dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan KIE
- e. Penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan pelayanan publik

Sasaran Kegiatan 8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Sasaran Kegiatan 8 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal. Indikator ini mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian target sudah baik.

1. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Realisasi Indeks Pengelolaan data dan Informasi UPT yang optimal di Loka POM di Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 sudah sesuai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan data dan informasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sanggau sudah berjalan dengan baik, dikarenakan aktifnya kesadaran dari setiap pegawai untuk melakukan pengelolaan data dan informasi. Selain itu setiap senin pic melakukan monitoring dan mengingatkan kembali terkait penggunaan e-mail korporat masing-masing pegawai.

Sasaran Kegiatan 9. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sanggau secara akuntabel

Pada sasaran kegiatan 9 ini, terdiri dari 4 (empat) indikator yang dimana 3 indikator mencapai target yaitu Nilai kinerja anggaran UPT dengan capaian 100,84%, Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan capaian 101,05%, Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan capaian 158,22%. 1 (satu) indikator tidak mencapai target yaitu indikator Nilai pengelolaan BMN, dimana capaian pada akhir periode renstra pada tahun 2024 adalah 87,40%. Hal ini akan menjadi evaluasi untuk perbaikan kinerja di periode berikutnya

1. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Adapun penyebab keberhasilan dari tercapainya target nilai kinerja anggaran UPT adalah perencanaan serta monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran telah dilakukan secara rutin.

2. Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa

Adapun penyebab keberhasilan dari tercapainya target Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa adalah perencanaan telah dilakukan dengan baik, serta monitoring dan evaluasi triwulan terhadap perencanaan pengadaan barang dan jasa. Laporan hasil pengadaan barang dan jasa juga dilaporkan tepat waktu dan sesuai perencanaan

3. Nilai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Loka POM di Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 89, dan mencapai kategori “Cukup”. Hal ini disebabkan kurangnya monitoring pengawasan terhadap Penetapan Status Pengguna yang belum diajukan atas mutasi aset masuk yang bernilai besar pada akhir tahun.

4. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Adapun penyebab keberhasilan tercapainya target Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah kesesuaian perencanaan dengan realisasi pengadaan produk dalam negeri yang telah di input pada sistem SIROUM dan penyesuaian tagging pada aplikasi SAKTI.

Sasaran Kegiatan 10. Terwujudnya SDM Balai POM di Kabupaten Sanggau yang berkinerja optimal

Sasaran Kegiatan 10 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni indeks Profesionalitas ASN UPT. Indikator ini

mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 96,33%. Capaian ini disebabkan adanya perubahan pengukuran indeks dari Badan Kepegawaian Negara.

1. Indeks Profesionalitas ASN

Loka POM di Kabupaten Sanggau belum mencapai target pada Tahun 2024 dikarenakan terdapat perubahan pengukuran IP ASN dalam beberapa dimensi penilaian. Perubahan dimensi penilaian ini terjadi pada pegawai yang diukur, yang sebelumnya hanya PNS berubah menjadi PNS dan PPPK. Selain itu terjadi juga perubahan pada dimensi kualifikasi sesuai surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 20 Juni 2024 Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024. Serta perubahan dimensi kompetensi dari yang sebelumnya riwayat pengembangan kompetensi saja yang menjadi tolak ukur, berubah menjadi riwayat pengembangan kompetensi disertai hasil kinerja. Ketidakberhasilan pencapaian target di Loka POM Sanggau akibat dari nilai kinerja ditambahkan sebagai komponen pada dimensi Kompetensi, dimana rata rata nilai kinerja pegawai BPOM adalah Baik (20), sehingga nilai maksimal pegawai pada dimensi kinerja adalah 35.

1.1.2 Aspirasi Stakeholder

Stakeholder memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sanggau. Sebagai mitra strategis, para stakeholder yang terdiri atas instansi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat, turut memberikan kontribusi melalui penyampaian masukan, umpan balik, dan dukungan terhadap berbagai kebijakan serta kegiatan pengawasan. Aspirasi dan pandangan dari para stakeholder menjadi landasan penting dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Sanggau Tahun 2025–2029 untuk memperoleh perspektif yang komprehensif terhadap berbagai tantangan dan peluang di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam rangka menjaring aspirasi tersebut, Balai POM di Sanggau melaksanakan berbagai mekanisme partisipatif, antara lain melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap bulan serta Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan secara berkala. Melalui kegiatan tersebut, Balai POM di Sanggau memperoleh beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, diantaranya:

- a. “Harapan kami PPOM terus bersinergi dg OPD di daerah seperti perindagkop, Satpol PP, Dinas Pendidikan, dll”.
- b. “Semoga beberapa fasilitas yang kurang seperti uji lab untuk menentukan nilai gizi tersedia di kota sanggau. Mengingat uji lab hanya ada di kota kota besar. ”

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kondisi wilayah kerja Balai POM di Sanggau berpotensi menyebabkan tingginya peredaran produk ilegal, di samping juga peredaran produk obat dan makanan secara daring yang semakin marak menyebabkan pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Sanggau harus lebih

komprehensif. Perkembangan UMKM di wilayah kerja Balai POM di Sanggau juga menuntut memiliki strategi khusus yang dapat meningkatkan daya saing peningkatan mutu dan keamanan pangan-pangan Balail untuk menjadi tuan rumah sendiri di negaranya

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Sanggau perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai POM di Sanggau, digunakan analisa SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Sanggau periode 2025-2029. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

1.2.3 Analisa Lingkungan Strategis

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel Analisis SWOT.

Adapun Strength (Kekuatan) yang dimiliki Balai POM di Sanggau adalah sebagai berikut:

- Balai POM di Sanggau memiliki *Dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan obat dan makanan sebagai UPT Badan POM* yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Telah terjalin *Kerjasama lintas sektor dengan Tersedianya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menunjang kegiatan pengawasan obat dan makanan oleh Pemerintah daerah* sejak tahun 2022 untuk Kab Sanggau, Kab Sekadau, dan Kab Sintang dengan kegiatan berupa pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen SPP-IRT, Pengawasan sarana IRTP pasca produk beredar, Pengawasan produk pangan industri rumah tangga dan pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan. Hal ini dibuktikan dengan nilai Indikator Kegiatan Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota memperoleh Capaian sebesar 100% dengan kriteria BAIK
- Balai POM di Sanggau memiliki *Integritas pelayanan publik yang diakui secara Nasional yang diakui dalam beberapa penghargaan. Balai POM di Sanggau meraih nilai Indeks Pelayanan Publik*

sebesar 4,48 pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 sebesar 4,93 dimana Balai POM di Sanggau menjadi Unit penyelenggara pelayanan publik dengan kategori pelayanan prima. Hal ini juga sejalan dengan Keterbukaan Informasi publik, dimana Balai POM di Sanggau menjadi UPT informatif dengan nilai pada tahun 2024 sebesar 92,72.

- Balai POM di Sanggau telah melakukan pendataan kebutuhan kompetensi pegawai termasuk GAP pelatihan pegawai serta pada awal tahun telah dilakukan pengajuan peserta pelatihan sesuai dengan daftar pelatihan yang telah dikeluarkan oleh PPSDM Badan POM. Balai POM di Sanggau telah memiliki pegawai yang tersertifikasi sesuai kompetensi di bidangnya. Diantaranya telah memiliki pegawai yang terspesialisasi yaitu inspektur pangan, inspektur kosmetik, inspektur CDOB, Penyuluh KIE, Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Melaksanakan fungsi dan berkomitmen dalam pengawasan obat dan makanan secara komprehensif serta berinovasi secara berkesinambungan. Balai POM berkomitmen untuk melaksanakan fungsi pengawasan obat dan makanan secara komprehensif, mencakup seluruh tahapan mulai dari pre market hingga post market guna menjamin keamanan, khasiat, dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Selain itu, Balai POM di Sanggau senantiasa berinovasi secara berkesinambungan dalam metode pengawasan, pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi agar pengawasan semakin efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis salah satunya melalui aplikasi Si Pintar untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan self assessment dalam penerapan CPPOB-IRT dan Sinbaku (Sinergi Balai POM Sanggau, Bea Cukai Entikong dan Loka Kekarantina Kesehatan Entikong)
- Pengembangan laboratorium Balai POM di Sanggau sesuai standar Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN), ini merupakan bagian dari strategi nasional Badan POM untuk mewujudkan laboratorium pengujian yang handal, terstandar, dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menjamin mutu dan keamanan produk yang beredar di masyarakat Balai POM di Sanggau diarahkan untuk memastikan keseragaman mutu pengujian diseluruh jaringan laboratorium pengawasan Badan POM. Pengembangan dilakukan secara bertahap, mencakup peningkatan kualitas infrastruktur, sistem manajemen mutu, kompetensi sumber daya manusia, serta integrasi sistem informasi laboratorium. Dari aspek infrastruktur dan fasilitas, laboratorium dikembangkan agar memenuhi persyaratan teknis sesuai standar SNI ISO/IEC 17025:2017 dan juga mencakup integrasi sistem informasi laboratorium yang terhubung dengan jaringan nasional PPOMN. Melalui sistem ini, proses pertukaran data, pelaporan hasil uji, dan koordinasi pengawasan antar laboratorium dapat dilakukan secara efisien dan transparan. Dari ruang pengujian dilengkapi dengan sarana pendukung yang memadai untuk pengujian kimia, mikrobiologi, dan parameter lainnya yang relevan dengan pengawasan obat, pangan, kosmetik, serta produk tradisional. Peningkatan ini juga memperhatikan faktor keselamatan kerja, efisiensi tata ruang, dan pengendalian lingkungan laboratorium. Laboratorium Balai POM di Sanggau menerapkan prinsip-prinsip sistem mutu laboratorium yang berorientasi pada keandalan hasil uji, validasi metode, serta kalibrasi peralatan secara berkala untuk memperoleh pengakuan formal

melalui akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang sekaligus memperkuat posisi laboratorium dalam jaringan pengujian nasional sehingga secara keseluruhan pengembangan laboratorium Balai POM di Sanggau sesuai standar PPPOMN diharapkan mampu memperkuat peran Balai POM di Sanggau sebagai garda terdepan dalam pengawasan obat dan makanan, khususnya di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan laboratorium yang berstandar nasional, hasil pengujian menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung upaya perlindungan masyarakat terhadap peredaran produk yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan.

- Balai POM di Sanggau Memiliki berbagai platform komunikasi (website, media sosial, aplikasi mobile) yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memudahkan dalam penyampaian informasi ke berbagai kalangan. salah satu media platform komunikasi Balai POM di Sanggau adalah website yang dapat diakses di alamat <https://sanggau.pom.go.id/>. Media Sosial yang dimiliki oleh Balai POM di Sanggau antara lain Facebook (Loka POM di Kabupaten Sanggau), Instagram (@bpom.sanggau), X (@bpom.sanggau), Youtube (BPOM Sanggau).
- UPT telah menerapkan Reformasi Birokrasi dan tersertifikasi QMS ISO 9001 : 2015
Reformasi Birokrasi (RB) adalah upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis), dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Balai POM di Sanggau telah menerapkan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Sejak tahun 2021 Balai POM di Sanggau telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu, dah telah tersertifikasi ISO 9001 : 2015. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa UPT telah menerapkan sistem yang teruji dan pemikiran berbasis risiko dalam mengelola kualitas layanannya.
- Memiliki jaringan komunikasi yang tersebar di wilayah kerja Balai POM di Kab. Sanggau melalui melalui Kader Keamanan Pangan Desa yang tersebar pada 13 Desa dan 49 anggota Saka POM Balai POM Sanggau memiliki keunggulan strategis dalam hal jangkauan pengawasan obat dan makanan melalui jaringan komunikasi yang telah terbangun secara sistematis di wilayah kerjanya. Kekuatan ini terwujud melalui pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Desa yang telah tersebar di 13 desa, didukung oleh 49 anggota Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan (Saka POM). Keberadaan jaringan ini memberikan beberapa keuntungan signifikan. Pertama, memungkinkan Balai POM untuk menjangkau wilayah-wilayah yang secara geografis mungkin sulit diakses secara langsung, sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan lebih merata di seluruh Kabupaten Sanggau. Kedua, kader-kader yang berasal dari masyarakat lokal memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi dan dinamika di wilayahnya masing-masing, sehingga dapat menjadi mata dan telinga yang efektif bagi Balai POM. Ketiga, melalui kader dan anggota Saka POM ini, proses edukasi dan sosialisasi tentang keamanan pangan serta pengawasan obat dan makanan dapat dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat. Hal ini tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi

aktif masyarakat dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan di lingkungan mereka. Dengan demikian, jaringan komunikasi yang tersebar ini menjadi aset strategis yang memperkuat kapasitas Balai POM Sanggau dalam menjalankan tugas pengawasan, sekaligus membangun sistem pengawasan yang partisipatif dan berbasis masyarakat.

Adapun Weakness (Kelemahan) yang dimiliki Balai POM di Sanggau adalah sebagai berikut:

- *Regulasi dan pedoman terkait pengawasan obat dan makanan belum lengkap, dan cepat berubah.* Regulasi dan pedoman dalam pengawasan cepat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perdagangan global. Kondisi ini dapat menimbulkan tantangan dalam penerapan standar pengawasan di lapangan dan memerlukan penyesuaian cepat dari Unit Kerja, baik dalam hal pemahaman regulasi, pelaksanaan kegiatan, maupun koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait
- Seiring dengan perkembangan peraturan dan kondisi di lapangan, *kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan perubahan yang bersifat dinamis.* Pendataan kompetensi pegawai serta gap pelatihan pegawai menjadi salah satu langkah persiapan peningkatan kompetensi ASN untuk menjawab tantangan dalam melakukan pengawasan obat dan makanan.
- Mekanisme terkait pertukaran informasi intelijen belum ada, sehingga dalam melakukan pengumpulan bahan keterangan untuk memperoleh informasi intelijen dari stakeholder terkait belum terpenuhi.
- Sarana dan Prasarana dalam pengawasan obat dan makanan belum memadai. Sarana dan prasarana dalam pengawasan obat dan makanan saat ini belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. Keterbatasan peralatan laboratorium, serta infrastruktur pendukung di wilayah kerja yang luas dan sebagian sulit dijangkau menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan yang cepat dan menyeluruh. Kondisi ini memerlukan upaya peningkatan kapasitas dan modernisasi sarana prasarana agar efektivitas pengawasan obat dan makanan dapat terus ditingkatkan
- Pemanfaatan sistem informasi yang belum maksimal dan belum terintegrasi. Pemanfaatan sistem informasi dalam pengawasan obat dan makanan saat ini belum maksimal dan belum sepenuhnya terintegrasi antar unit kerja maupun dengan instansi terkait. Kondisi ini dapat menghambat pertukaran data, analisis informasi, serta pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi sistem informasi agar pengelolaan data pengawasan menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap perkembangan situasi di lapangan
- Hasil uji menggunakan rapid test kit kurang akurat dibandingkan dengan metode pengujian laboratorium

Untuk Opportunity (Peluang) yang dimiliki Balai POM di Sanggau adalah sebagai berikut:

- *Adanya Tuntutan reformasi birokrasi untuk menerapkan zona integritas* Sebagai bentuk nyata dari

komitmen tersebut, Balai POM di Sanggau secara bertahap menerapkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penerapan zona integritas dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip good governance, menumbuhkan budaya kerja yang profesional, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Dalam implementasinya, Balai POM di Sanggau menekankan pentingnya kepemimpinan yang berintegritas, sistem kerja yang transparan, serta pengawasan internal yang efektif. Selain itu, dilakukan pula peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi pelayanan publik, serta penerapan inovasi yang mendukung efisiensi dan akuntabilitas kinerja.

Melalui langkah-langkah tersebut, Balai POM di Sanggau berupaya menjadi instansi pemerintah yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus menjadi contoh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau. Dengan demikian, penerapan Zona Integritas diharapkan tidak hanya menjadi komitmen administratif, tetapi juga menjadi budaya kerja yang melekat dan berkelanjutan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan.

- Kebijakan pemerintah terkait peningkatan kualitas pelayanan publik yang tengah digalakkan secara nasional menjadi peluang strategis bagi Balai POM di Sanggau untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan publik yang telah berjalan baik menjadi semakin baik. Momentum reformasi birokrasi dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sejalan dengan upaya berkelanjutan yang telah dilakukan Balai POM di Sanggau. Peluang ini dapat dioptimalkan Balai POM di Sanggau melalui beberapa strategi. Pertama, terus mengembangkan inovasi layanan pengawasan obat dan makanan agar lebih aksesibel, baik melalui pendekatan konvensional maupun digital. Kedua, mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan perizinan dan sertifikasi untuk mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha lokal di wilayah kerja Sanggau. Ketiga, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat dalam menciptakan ekosistem pelayanan yang terintegrasi. Keempat, dengan konsistensi peningkatan kualitas pelayanan, kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Balai POM akan terus meningkat, sehingga memperkuat posisi dan kredibilitas institusi. Dengan memanfaatkan peluang ini, Balai POM di Sanggau dapat terus bertransformasi menjadi institusi pelayanan publik yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengawasan obat dan makanan di tingkat daerah, sekaligus memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat dari risiko produk yang tidak memenuhi standar keamanan
- Penggunaan pihak ketiga dalam pengelolaan tenaga outsourcing, menyebabkan pengelolaan kinerja dapat lebih efektif dan efisien. Melalui kerja sama dengan pihak ketiga, pengelolaan tenaga outsourcing dapat dilakukan secara lebih profesional dan terukur. Mekanisme ini memungkinkan Balai POM di Sanggau untuk fokus pada pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi utama organisasi, sementara aspek administrasi dan pengelolaan tenaga pendukung dapat ditangani

secara efisien oleh penyedia jasa yang berkompeten.

Dengan sistem ini, pengawasan terhadap kinerja tenaga outsourcing dapat dilaksanakan secara lebih objektif dan sistematis, karena terdapat standar evaluasi kinerja yang jelas dan terukur. Selain itu, penggunaan pihak ketiga juga memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan beban kerja dan prioritas kegiatan instansi.

- Pintu masuk perbatasan yang semakin mudah diakses sehingga terdapat pelayanan pengawasan oleh Balai POM di Sanggau di perbatasan Sebagai salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kabupaten Sanggau memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan mutu produk obat dan makanan yang beredar di wilayah perbatasan. Seiring dengan semakin mudahnya akses dan mobilitas masyarakat melalui pintu masuk perbatasan, Balai POM di Sanggau terus memperkuat upaya pengawasan untuk memastikan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan dikonsumsi masyarakat telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudahan akses di pintu perbatasan, seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau dan PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan interaksi lintas batas. Namun, hal ini juga berpotensi meningkatkan risiko peredaran produk obat dan makanan ilegal atau tidak memenuhi standar. Menyikapi hal tersebut, Balai POM di Sanggau menempatkan layanan pengawasan dan pemeriksaan secara aktif di kawasan perbatasan.

- *Jenis dan jumlah peredaran obat dan makanan yang semakin meningkat dan bervariasi sehingga hasil pengawasan dapat menggambarkan profil keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Sanggau.*

Jenis dan jumlah peredaran obat dan makanan yang semakin meningkat dan bervariasi di wilayah kerja Balai POM di Sanggau menjadi peluang untuk memperkuat pengawasan dan pemetaan profil keamanan serta mutu produk yang beredar di masyarakat. Melalui kegiatan pengawasan yang terencana dan berbasis risiko, Balai POM di Sanggau dapat menghasilkan data dan informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi peredaran obat dan makanan, sehingga mendukung pengambilan kebijakan dan tindak lanjut pengawasan yang lebih tepat sasaran.

- Berkembangnya teknologi digital yang memudahkan penyebaran informasi Obat dan makanan Balai POM di Sanggau memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik dan memperkuat edukasi masyarakat terkait pentingnya penggunaan obat yang aman serta konsumsi pangan yang bermutu. Melalui berbagai platform digital seperti media sosial, situs web resmi, dan aplikasi informasi publik, Balai POM di Sanggau secara aktif menyampaikan informasi mengenai pengawasan, peringatan produk, hasil uji laboratorium, serta kampanye Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat) dan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa).

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih cepat dan transparan melalui sistem pelaporan daring, basis data produk, serta koordinasi lintas

instansi yang terintegrasi. Hal ini mendukung terciptanya sistem pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

- *Potensi kolaborasi dengan lintas sektor dalam melakukan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sanggau.*

Balai POM di Sanggau memiliki kolaborasi yang baik antar lintas sektor. Balai POM di Sanggau secara rutin melakukan pengawasan bersama dengan TPID (tim pengendali inflasi daerah) serta lintas sektor lain seperti dalam pengawasan bersama menjelang hari besar maupun kegiatan rutin pengawasan obat dan makanan, dilakukan juga pengawasan yang bermuara pada penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan obat dan makanan tidak memenuhi ketentuan yang dilaksanakan dengan melibatkan Polres setempat, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Dengan bekerja sama bersama lintas sektor, pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan menyeluruh, mulai dari pintu masuk perbatasan hingga distribusi di masyarakat. Kolaborasi ini juga memungkinkan pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan pemanfaatan sumber daya secara optimal, sehingga keamanan, mutu, dan khasiat produk yang beredar di wilayah kerja dapat lebih terjamin.

- *Menguatnya 3 pilar pengawasan (Pemerintah, Pelaku Usaha, Masyarakat) dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan*

Dalam upaya mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan menyeluruh, Balai POM di Sanggau terus memperkuat sinergi tiga pilar pengawasan, yaitu Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat. Ketiga pilar ini memiliki peran penting yang saling melengkapi dalam memastikan peredaran obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Pemerintah berperan sebagai regulator dan pengawas, pelaku usaha bertanggung jawab dalam menjamin mutu produk yang dihasilkan, sedangkan masyarakat berperan aktif sebagai konsumen cerdas yang kritis terhadap produk yang dikonsumsi.

Melalui kolaborasi yang kuat di antara ketiga pilar tersebut, Balai POM di Sanggau berkomitmen untuk membangun sistem pengawasan yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan, guna melindungi masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas di bidang obat dan makanan

Untuk Threat (Ancaman) yang dimiliki Balai POM di Sanggau adalah sebagai berikut:

- *Wilayah kerja Balai POM Sanggau di daerah perbatasan menyebabkan risiko peredaran obat dan makanan tanpa izin edar cukup tinggi.*

Sebagai wilayah perbatasan, arus keluar-masuk barang dan pelintas cukup tinggi, baik melalui jalur resmi maupun jalur tidak resmi (jalur tikus). Hal ini meningkatkan potensi masuknya produk dari luar negeri yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya temuan terkait produk tanpa izin edar oleh Petugas Balai POM di Sanggau

- *Menurunnya kepercayaan publik atas narasi negatif BPOM dan hasil pengujian rapid test kit*

Menurunnya kepercayaan publik terhadap Badan POM akibat narasi negatif, terutama terkait hasil pengujian Obat dan Sediaan farmasi seperti rapid test kit, dapat menimbulkan beberapa risiko serius. Untuk mengatasi hal ini, Balai POM di Sanggau perlu secara proaktif memberikan

penjelasan publik dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menyebarkan informasi yang akurat dan terverifikasi. Serta meningkatkan kemampuan Laboratorium untuk meningkatkan kualitas hasil uji.

- *Pertumbuhan jumlah pelaku usaha berkembang pesat yang menyebabkan peredaran obat dan makanan juga membutuhkan kemampuan pengujian dengan ruang lingkup yang lebih luas*
Pertumbuhan pesat jumlah pelaku usaha obat dan makanan, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), di wilayah kerja Balai POM Sanggau menimbulkan beberapa risiko signifikan yang mendasari kebutuhan mendesak akan pengembangan kemampuan pengujian. Secara singkat, pertumbuhan pesat pelaku usaha menuntut sistem pengawasan yang lebih kuat dan canggih, di mana pengembangan kemampuan pengujian Balai POM Sanggau bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan esensial untuk menjamin keamanan produk yang beredar dan melindungi kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.
- *Perubahan iklim dapat mempengaruhi perencanaan kegiatan utama Unit Kerja.* Kondisi infrastruktur jalan di wilayah kerja Balai POM di Sanggau yang masih terbatas di beberapa wilayah, cuaca ekstrim, serta potensi banjir di beberapa wilayah dapat menghambat petugas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan makanan. Oleh karena itu, dalam perencanaan kegiatan, Balai POM Sanggau perlu mempertimbangkan faktor risiko perubahan iklim agar pelaksanaan tugas tetap efektif dan berkelanjutan
- *Pesatnya peredaran hoaks dan informasi yang tidak valid tentang obat dan makanan pada sistem informasi BPOM.* Informasi yang menyesatkan di media sosial dan platform digital dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang telah memiliki izin edar serta memicu kepanikan atau konsumsi produk yang tidak aman. Oleh karena itu, BPOM perlu memperkuat sistem informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses, serta meningkatkan literasi masyarakat agar mampu membedakan informasi resmi dengan hoaks
- *Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM Sanggau.*
Masih tingginya jumlah pelanggaran di bidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM Sanggau merupakan indikasi adanya tantangan serius dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat setempat. Hal ini secara konkret dibuktikan melalui sejumlah perkara hukum yang berhasil ditangani oleh penyidik Balai POM Sanggau, menunjukkan aktivitas penegakan hukum yang proaktif namun juga mencerminkan skala permasalahan yang masih signifikan di lapangan. Sejak tahun 2019-2024 dibuktikan dengan perkara hukum yang ditangani oleh penyidik Balai POM Sanggau sebanyak enam perkara.
- *Penyidikan terhambat karena terjadi pra peradilan dan tersangka melarikan diri.*
Praperadilan dapat menghadirkan risiko signifikan terhadap kelancaran proses penyidikan, termasuk potensi terhambatnya proses hukum dan pelarian tersangka. Ketika permohonan praperadilan diajukan, proses penyidikan seringkali menghadapi hambatan atau penundaan. Selama proses sidang praperadilan berlangsung, yang putusannya bersifat final dan cepat,

penyidik harus fokus mempersiapkan argumen dan bukti untuk mempertahankan keabsahan tindakannya di pengadilan. Hal ini secara tidak langsung dapat mengalihkan sumber daya dan perhatian dari fokus utama penyidikan perkara.

Tabel 3. Hasil Analisis SWOT Balai POM di Sanggau

KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
1. Dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan obat dan makanan sebagai UPT Badan POM 2. Kerjasama lintas sektor dengan Tersedianya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menunjang kegiatan pengawasan obat dan makanan oleh Pemerintah daerah 3. Integritas pelayanan publik yang diakui secara Nasional 4. Kebutuhan kompetensi pegawai telah didata dan direncanakan 5. Melaksanakan fungsi dan berkomitmen dalam pengawasan obat dan makanan secara komprehensif serta berinovasi secara berkesinambungan 6. Pengembangan laboratorium Balai POM di Sanggau sesuai standar Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) 7. Memiliki berbagai platform komunikasi (website, media sosial, aplikasi mobile) 8. UPT telah menerapkan Reformasi Birokrasi dan tersertifikasi QMS ISO 9001 : 2015 9. Memiliki jaringan komunikasi yang tersebar di wilayah kerja Balai POM di Kab. Sanggau melalui Kader Keamanan Pangan Desa yang tersebar pada 13 Desa dan 49 anggota Saka POM	1. Regulasi dan pedoman terkait pengawasan obat dan makanan belum lengkap, dan cepat berubah 2. kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan perubahan yang bersifat dinamis 3. Mekanisme terkait pertukaran informasi intelijen belum ada 4. Sarana dan Prasarana dalam pengawasan obat dan makanan belum memadai 5. Pemanfaatan sistem informasi yang belum maksimal dan belum terintegrasi 6. Hasil uji menggunakan rapid test kit kurang akurat dibandingkan dengan metode pengujian laboratorium
PELUANG (OPPORTUNITY)	ANCAMAN (THREAT)

1. Adanya Tuntutan reformasi birokrasi untuk menerapkan zona integritas 2. Adanya Kebijakan Pemerintah terkait Peningkatan kualitas Pelayanan Publik 3. Penggunaan pihak ketiga dalam pengelolaan tenaga outsourcing, menyebabkan pengelolaan kinerja dapat lebih efektif dan efisien 4. Pintu masuk perbatasan yang semakin mudah diakses sehingga terdapat pelayanan pengawasan oleh Balai POM Sanggau di perbatasan 5. Jenis dan jumlah peredaran obat dan makanan yang semakin meningkat dan bervariasi sehingga hasil pengawasan dapat menggambarkan profil keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja Balai POM Sanggau 6. Berkembangnya teknologi digital yang memudahkan penyebaran informasi Obat dan makanan 7. Potensi kolaborasi dengan lintas sektor dalam melakukan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sanggau 8. Menguatnya 3 pilar pengawasan (Pemerintah, Pelaku Usaha, Masyarakat) dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan	1. Wilayah kerja Balai POM Sanggau di daerah perbatasan menyebabkan risiko peredaran obat dan makanan tanpa izin edar cukup tinggi 2. Menurunnya kepercayaan publik atas narasi negatif BPOM dan hasil pengujian rapid test kit 3. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha berkembang pesat yang menyebabkan peredaran obat dan makanan juga membutuhkan kemampuan pengujian dengan ruang lingkup yang lebih luas 4. Perubahan iklim dapat mempengaruhi perencanaan kegiatan utama Unit Kerja 5. Pesatnya peredaran hoaks dan informasi yang tidak valid tentang obat dan makanan pada sistem informasi BPOM 6. Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang obat dan makanan 7. penyidikan terhambat karena terjadi pra peradilan dan tersangka melarikan diri
--	---

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Balai POM di Sanggau perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Badan POM periode 2025-2029.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

2.1 Visi

Balai POM di Sanggau sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Penjelasan Visi:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencantuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup

masyarakat di Indonesia.

2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8

Misi Balai POM di Sanggau sejalan dengan misi BPOM, yaitu:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan

terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai POM di Sanggau sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

2.3 TUJUAN

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sanggau bertekad kuat untuk menjadi ujung tombak pengawasan di wilayah kerjanya yang luas, mencakup lima kabupaten di Kalimantan Barat dalam mendukung tujuan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap

pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Tujuan BPOM tersebut didukung langsung oleh Balai POM di Sanggau sesuai dengan kerangka logis kinerja.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 seperti tercantum dalam table berikut:

Tabel 4. Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan

bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Tujuan BPOM tersebut didukung langsung oleh Balai POM di Sanggau sesuai dengan kerangka logis kinerja.

2.4 SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Sanggau dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025 - 2029) ke depan diharapkan Balai POM di Sanggau akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. **Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

Sasaran ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan Balai POM di Sanggau dalam mengidentifikasi dan merespon secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari obat dan makanan yang beredar. Optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium menjadi strategi yang dapat mendukung pencapaian sasaran kinerja dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Sasaran kegiatan ini juga menjadi

salah satu langkah untuk mengukur ketercapaian kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, dimana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil terutama terkait dengan pengawasan produk industri rumah tangga pangan.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini dengan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- b. Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- c. Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar

2. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Sasaran ini menekankan pada peningkatan Balai POM di Sanggau dalam menyampaikan informasi yang relevan, jelas, dan mudah dipahami kepada masyarakat serta pelaku usaha tentang keamanan, manfaat, dan mutu produk obat dan makan. Strategi seperti kolaborasi dengan lintas sektor, dan diversifikasi media KIE untuk memperluas jangkauan KIE. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini dengan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sasaran ini berfokus pada peningkatan Balai POM di Sanggau dalam memberikan pendampingan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memahami dan menerapkan standar keamanan serta mutu produk yang sesuai dengan regulasi. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini dengan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran ini menekankan pada pelaksanaan tindakan hukum yang tegas, cepat, dan sesuai prosedur oleh Balai POM di Sanggau terhadap pelanggaran atau kejahatan terkait distribusi, produksi, atau penjualan sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal atau tidak memenuhi standar. Strategi seperti Kolaborasi lintas sektor, dan penguatan pengawasan intelijen mendukung tercapainya sasaran ini dengan menciptakan kerja sama yang solid, sumber daya yang memadai, dan komitmen kuat dari seluruh pihak agar wilayah kerja UPT dapat menjadi area yang aman dari produk farmasi dan pangan olahan ilegal. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini dengan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

5. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

Sasaran ini berfokus pada implementasi langkah-langkah yang terstruktur untuk mendeteksi, memantau, dan menangani kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan melalui platform digital. Kejahatan ini mencakup penjualan obat palsu, pangan tidak memenuhi standar, atau barang ilegal melalui ecommerce, media sosial, dan situs web lainnya. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini dengan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT

6. Layanan Publik UPT yang Prima

Sasaran ini menekankan pada peningkatan Balai POM di Sanggau dalam memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi, efisien, transparan dalam pengawasan obat dan makanan kepada Masyarakat dan stakeholder. Pelayanan publik yang prima bertujuan melindungi Masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap peran pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini dengan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) Indeks Pelayanan Publik UPT

7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Sasaran ini ditujukan pada pelaksanaan tata kelola yang baik (good governance) di dalam Balai POM di Sanggau. Pelaksanaan tata kelola yang baik (good governance) mencakup penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam seluruh aspek pengelolaan organisasi. Strategi penguatan sistem pengendalian Internal serta peningkatan kapasitas SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini dengan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Nilai AKIP UPT BPOM
- b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
- d. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Tabel 5 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Sanggau periode 2025-2029

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> 2. <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> 3. <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> 4. <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 5. <i>Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 6. <i>Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 2. <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> 3. <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 4. <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> 5. <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 6. <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i> 7. <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 9. <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi <i>Indikator:</i> Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> 1. <i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> 2. <i>Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> 3. <i>Jumlah desa pangan aman</i> 4. <i>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator:</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i> Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	<i>Indeks RB BPOM</i>	<i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	<i>Indikator:</i> 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 5. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT 6. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar 7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Sanggau 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan kegiatan dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Balai POM di Sanggau untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan kegiatan, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran kegiatan Balai POM di Sanggau sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.

Tabel 6 Indikasi Resiko Sasaran Kegiatan Balai POM di Sanggau

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya jumlah kasus KLB KP di wilayah kerja Balai POM di Sanggau.	a. Memastikan keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan SPPG, Bimtek terhadap Pengawas, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), SPPG, serta dukungan laboratorium untuk mendeteksi cemaran dan penanganan KLB KP. b. Koordinasi dengan BGN terkait pengawasan SPPG dan pelatihan terhadap SPPI, Penjamah Pangan di SPPG dan penerima manfaat.	Fungsi Pemeriksaan
		Kurangnya pemenuhan komponen peralatan laboratorium dalam memenuhi kebutuhan pengawasan	a. Mengirim sampel rutin yang dilakukan setiap bulan untuk dikirim ke regionalisasi laboratorium	Fungsi Pengujian

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Masih beredarnya produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mengandung bahan kimia obat atau bahan berbahaya	a. Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam di fasilitas peredaran b. Bimtek kepada Pelaku Usaha Distribusi Obat Bahan Alam dan Kosmetik	Fungsi Pemeriksaan
		Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan Balai POM di Sanggau	a. Pendampingan pelaku usaha berupa desk dan Bimtek b. Pendampingan oleh petugas BPOM baik melalui pengawasan pre market maupun post market c. Pelatihan peningkatan kompetensi dan pemahaman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) terkini pada pelaku usaha d. Pemberian sanksi sesuai ketentuan berupa peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara kegiatan.	Fungsi Pemeriksaan
		Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di daerah. b. Pertemuan advokasi dan Bimtek Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan c. Koordinasi bersama lintas sektor dan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan iklan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan d. Monitoring tindak lanjut kepada lintas sektor	Fungsi Pemeriksaan
		Masih maraknya tautan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal yang diedarkan secara daring	a. Melakukan perkuatan infrastruktur yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal secara daring	Fungsi Pemeriksaan
		Produk pangan fortifikasi yang sampling tidak sesuai	a. Menggunakan pedoman sampling berbasis risiko.	Fungsi Pemeriksaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		penerapan pengawasan berbasis resiko	b. Peningkatan kompetensi petugas sampling. c. koordinasi dengan Laboratorium regional terkait kemampuan uji	
		Kurangnya pemenuhan komponen peralatan laboratorium dalam memenuhi kebutuhan peningkatan Ruang Lingkup	a. Melakukan perencanaan dan penilaian kebutuhan ruang lingkup yang komprehensif. b. melakukan pengadaan alat berkelanjutan sesuai prioritas.	Fungsi Pemeriksaan
2	Meningkatnya efektivitas KIE	Amplifikasi KIE belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah kerja Balai POM di Sanggau dan kelompok sasaran secara optimal	a. Pengelolaan KIE pada Balai POM di Sanggau mulai dari perencanaan hingga evaluasi b. Mengembangkan strategi KIE berbasis segmentasi (remaja, pelajar, pelaku UMKM, ibu rumah tangga, tokoh masyarakat) dengan pendekatan sesuai karakteristik sasaran c. Optimalisasi jaringan kader dan memperluas sebaran kader ke desa-desa yang belum terjangkau d. Mengembangkan media KIE digital (media sosial, WhatsApp group, website) untuk menjangkau wilayah terpencil e. Membuat konten KIE dalam format yang mudah dipahami dan menarik (video pendek, infografis, poster) f. Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor melalui penyusunan dokumen kerja sama, penyusunan rencana aksi serta monitoring dan evaluasi.	Fungsi Infokom
3	Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan mutu	Ketidakmampuan UMKM Obat dan Makanan Memahami dan Mengimplementasikan Good Manufacturing Practice (GMP)	Melakukan Bimtek dan Sosialisasi terkait GMP terhadap pelaku usaha UMKM	Fungsi Sertifikasi
		Pemutakhiran Data UMKM masih minim	Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait permintaan data UMKM yang dapat didampingi dalam rangka pemenuhan standar keamanan mutu	Fungsi Sertifikasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Lemahnya fungsi deteksi terhadap potensi dan/atau indikasi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sehingga peluang peredaran produk ilegal tidak segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti.	a. Optimalisasi Dashboard Penindakan yang terintegrasi nasional. b. Peningkatan kapasitas petugas cegah tangkal, intelijen dan siber. c. Penguatan jejaring dan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Fungsi Penindakan
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Risiko Ancaman Siber yang Berkembang	a. Melakukan Pelatihan terkait pengembangan pemantauan siber pada pegawai fungsi penindakan b. Menjalin kerjasama lintas sektor untuk memerangi ancaman siber di wilayah kerja	Fungsi Penindakan
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Layanan publik yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan pengguna	a. Melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas layanan, b. Menindaklanjuti feedback dari pengguna c. meningkatkan transparansi dan komunikasi kepada masyarakat terkait proses dan prosedur layanan.	Fungsi Infokom
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Sistem Akuntabilitas Balai POM di Sanggau belum optimal	a. Melakukan Sosialisasi dan Pelatihan Internal terkait penerapan SAKIP (Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan Kinerja) kepada seluruh pegawai b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala (triwulan) untuk menilai capaian dan tindak lanjut	Fungsi Tata Usaha
		Nilai Kinerja Anggaran belum optimal	a. Melakukan perencanaan anggaran berbasis kinerja dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya b. Melakukan rapat monitoring realisasi anggaran secara berkala untuk mengidentifikasi deviasi penyerapan anggaran c. Melaksanakan evaluasi kinerja anggaran akhir tahun untuk mengidentifikasi akar masalah dan menyusun rencana perbaikan tahun	Fungsi Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			berikutnya	

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.

3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha.

Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan

kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.

5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.

4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.

6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian

laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data

7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 7. Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Balai POM di Sanggau berkomitmen penuh untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi BPOM periode 2025-2029 melalui penguatan sistem pengawasan obat dan makanan yang adaptif dan inovatif.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi / Satker

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan

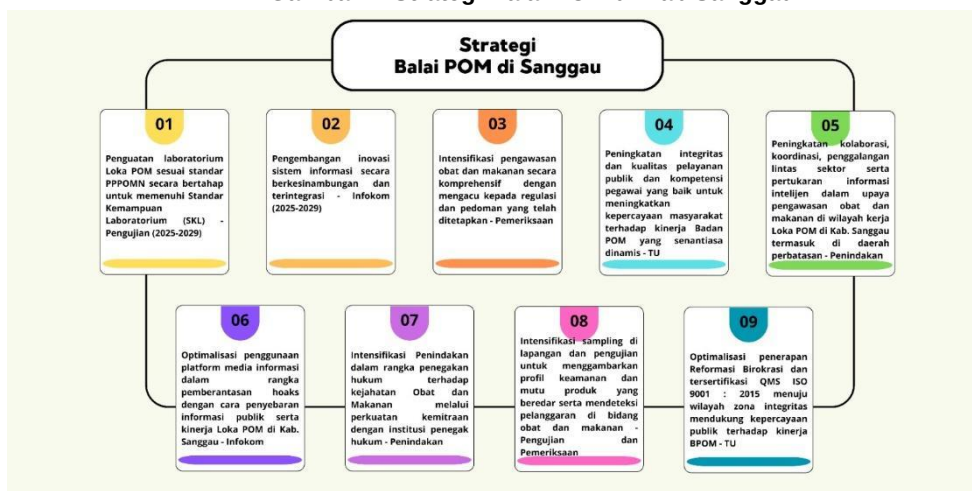
utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Balai POM di Sanggau mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut :

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Strategi Balai POM di Sanggau mengacu kepada analisis SWOT yang telah di susun. Untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Balai POM di Sanggau periode 2025-2029, ditentukan strategi sebagai berikut:

3.2.1 Strategi Balai POM di Sanggau

Gambar 4. Strategi Balai POM di Kab Sanggau



Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Balai POM di Sanggau melakukan Analisa

program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

Uraian Rumusan Strategi

1. Penguatan laboratorium Balai POM sesuai standar PPPOMN secara bertahap untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)

Pengujian merupakan bagian penting dari pengawasan Obat dan Makanan. Dalam upaya membangun kepercayaan publik, Balai POM di Sanggau berkomitmen dalam Pengembangan laboratorium sesuai standar Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN). Adapun bentuk penguatan laboratorium yang dilakukan diantaranya pengembangan Standar Ruang Lingkup (SRL), pemenuhan sarana prasarana serta melakukan pengembangan kompetensi terkait pengujian bagi petugas pengujian. Proses penguatan Pengembangan Standar Ruang Lingkup (SRL), aspek Gender dan Inklusi Sosial menjadi prinsip yang diintegrasikan untuk memastikan bahwa pengembangan kapasitas laboratorium berjalan secara setara, inklusif, dan berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengikuti pelatihan, dan pengembangan kompetensi teknis maupun manajerial untuk mendorong terciptanya lingkungan laboratorium yang aman, bebas dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, serta menyediakan fasilitas pendukung seperti area kerja yang aksesibel, dan kebijakan kerja yang mempertimbangkan keseimbangan kehidupan kerja. Pengembangan Standar Ruang Lingkup (SRL) dilakukan dengan cara mempersiapkan metode analisis, serta perencanaan kebutuhan reagensia secara periodik. Upaya untuk memenuhi sarana dan prasarana dilakukan dengan perencanaan pembangunan gedung laboratorium, perencanaan pengadaan alat-alat laboratorium, kebutuhan daya listrik, sistem penanganan limbah sesuai *Road Map* pengembangan laboratorium. Selain itu Balai POM Sanggau berkomitmen melakukan perencanaan kebutuhan kompetensi Pengujian sesuai kebutuhan, melaksanakan peningkatan kompetensi sesuai yang direncanakan, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

2. Pengembangan inovasi sistem informasi secara berkesinambungan dan terintegrasi

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan sehingga menuntut Balai POM di Sanggau untuk menyikapi perubahan ini. Untuk itu, Balai POM di Sanggau telah memiliki Standar Infrastruktur TIK dalam rangka meningkatkan kualitas *government process*. Berbagai sistem informasi yang telah dimiliki akan diintegrasikan satu sama lain sehingga memudahkan pengampu kebijakan di dalam mengambil keputusan. Selain itu, pelatihan SDM TIK secara berkesinambungan juga dilakukan untuk menjamin sistem informasi yang telah terbentuk berjalan secara optimal dan mampu melahirkan inovasi-inovasi pengembangan kedepannya. Pengembangan inovasi sistem informasi yang terintegrasi dapat memperkuat tata kelola data serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik yang secara adil dapat memberikan pengembangan dan pemanfaatan, prinsip Gender dan Inklusi Sosial sebagai bagian penting agar transformasi digital

yang dilakukan bersifat setara, partisipatif, dan tidak diskriminatif, penggunaan sistem informasi diselenggarakan dengan memperhatikan kesetaraan kesempatan bagi pegawai perempuan dan laki-laki, Sistem informasi dikembangkan untuk mampu mengelola data terpilah berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, wilayah, dan karakteristik sosial lainnya. Data ini penting untuk mendukung analisis dan perumusan kebijakan yang lebih responsif gender dan inklusif, serta kebijakan anti-diskriminasi dan anti-kekerasan berbasis gender di ruang digital.

3. Intensifikasi pengawasan obat dan makanan secara komprehensif dengan mengacu kepada regulasi dan pedoman yang telah ditetapkan

Pengawasan obat dan makanan perlu dilakukan secara komprehensif mencakup seluruh aspek dalam siklus hidup obat dan makanan dari mulai produksi hingga distribusi bahkan hingga dikonsumsi oleh masyarakat. Pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi dalam pengawasan peredaran obat dan makanan perlu dilakukan untuk memastikan produk obat dan makanan yang beredar merupakan produk yang aman, berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pendekatan ini tidak hanya mengawasi produk secara terbatas pada titik tertentu dalam rantai distribusi, tetapi secara menyeluruh pada setiap tahapan, termasuk pencegahan, deteksi, dan penindakan. Dalam pelaksanaannya, pendekatan Gender dan Inklusi Sosial diintegrasikan untuk memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara adil, setara, dan berorientasi pada perlindungan seluruh kelompok masyarakat serta penguatan kapasitas petugas pengawas dilakukan secara setara, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai perempuan dan laki-laki untuk mengikuti pelatihan, serta menempati posisi strategis dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan di bidang pengawasan serta dapat mempertimbangkan dampak yang berbeda terhadap perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia, dan kelompok masyarakat dengan akses terbatas terhadap informasi atau layanan kesehatan. Misalnya, pengawasan yang lebih ketat terhadap produk yang banyak digunakan oleh perempuan atau kelompok anak-anak dalam mendukung pengawasan, dilakukan edukasi publik dan komunikasi risiko yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang beragam, termasuk masyarakat di daerah terpencil. Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam memahami bahaya produk yang tidak aman. Pengawasan ini dilakukan mengacu pada regulasi dan pedoman yang terus disempurnakan sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan zaman, teknologi serta dinamika industri. Pengawasan full spectrum merupakan sistem yang lebih proaktif dan holistik dibandingkan dengan pendekatan yang hanya fokus pada satu aspek atau titik tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap kesehatan masyarakat, menjamin produk yang beredar sesuai dengan standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan, serta memastikan integritas pasar obat dan makanan di Indonesia.

4. Peningkatan integritas, kualitas pelayanan publik dan kompetensi pegawai yang baik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Badan POM yang senantiasa dinamis

Balai POM Sanggau berdedikasi untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang transparan, akuntabel, dan responsif. Melalui Implementasi zona integritas reformasi birokrasi Balai POM Sanggau dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaannya, pendekatan Gender dan Inklusi Sosial diintegrasikan untuk memastikan bahwa peningkatan kinerja organisasi tidak hanya berfokus pada efisiensi dan kualitas teknis, tetapi juga menjamin keadilan, kesetaraan kesempatan, dan inklusivitas. Kualitas pelayanan publik ditingkatkan dengan memperhatikan kebutuhan dan pengalaman antara laki-laki dan perempuan sebagai pengguna layanan. Balai POM Sanggau memastikan bahwa seluruh pegawai, baik perempuan maupun laki-laki, memperoleh kesempatan yang sama dalam pelatihan, pendidikan, peningkatan kompetensi, dan promosi jabatan. Upaya ini penting untuk mengurangi kesenjangan gender dalam posisi kepemimpinan dan jabatan strategis, menghargai kesetaraan gender, bebas dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, ramah di lingkungan Balai POM Sanggau. Untuk menjalankan strategi ini telah ditetapkan Maklumat Pelayanan, Kode Etik dan Standar Pelayanan Publik serta sarana dan prasarana sesuai standar. Demi mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas dilakukan pelatihan terhadap petugas pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh internal dan eksternal Badan POM. Balai POM Sanggau berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawai secara terus-menerus dengan melakukan perencanaan kebutuhan kompetensi sesuai kebutuhan, melaksanakan peningkatan kompetensi sesuai yang direncanakan, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Balai POM Sanggau menerapkan sistem informasi terbuka melalui PPID, melakukan publikasi data dan informasi kinerja melalui website resmi. Balai POM Sanggau juga terbuka terhadap peran serta publik di dalam meningkatkan kualitas layanannya melalui Forum Konsultasi Publik secara berkala untuk menjaring masukan dan saran perbaikan serta harapan stakeholder atas layanan yang mereka terima. Di dalam menjamin mutu layanan publik yang dihasilkan, Balai POM Sanggau melaksanakan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal meliputi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan serta pelaksanaan Audit Internal. Pengawasan eksternal meliputi Nomor Pengaduan Layanan Publik, SP4N Lapor!, *Whistleblowing System*, Pelaksanaan Audit BPK dan BPKP.

5. Peningkatan kolaborasi, koordinasi, penggalangan lintas sektor serta pertukaran informasi intelijen dalam upaya pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Sanggau termasuk di daerah perbatasan

Kondisi geografis dari wilayah kerja Balai POM di Sanggau yang berbatasan langsung dengan negara lain cukup mempengaruhi bisnis global karena merupakan pintu masuk dan keluar berbagai jenis komoditi termasuk obat dan makanan yang menjadi bagian dari pengawasan

Badan POM. Pintu perbatasan negara yang resmi maupun jalur tikus yang semakin mudah diakses menyebabkan perlunya ditingkatkan pelayanan dan kerjasama dari berbagai Instansi dalam hal pengawasan pemasukan dan peredaran obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Sanggau. Penggalangan dukungan dari pemangku kepentingan terhadap pengawasan obat dan makanan juga dilakukan pendekatan responsif gender yang menjadi bagian penting dalam memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas Balai POM di Sanggau, khususnya dalam konteks pengawasan obat dan makanan di wilayah perbatasan. Pengarusutamaan gender (PUG) tidak hanya berfokus pada kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga pada bagaimana perbedaan peran, kebutuhan, dan perspektif gender dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kerja sama lintas sektor serta efektivitas pengawasan yang terlibat aktif baik pegawai laki-laki maupun perempuan pada forum koordinasi lintas sektor (seperti dengan instansi pemerintah daerah, Bea Cukai, TNI/Polri, Dinas Kesehatan, dan masyarakat) sangat penting. Representasi gender yang seimbang membantu menghadirkan beragam perspektif dalam proses perumusan kebijakan dan strategi pengawasan, sehingga keputusan yang diambil lebih komprehensif, adaptif terhadap kebutuhan lapangan, dan sensitif terhadap isu sosial masyarakat perbatasan untuk terus meningkatkan pengawasan dan peredaran obat dan makanan ilegal di wilayah perbatasan. Peningkatan Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Perbatasan terus menerus dilakukan untuk memastikan bahwa Balai POM di Sanggau mendapatkan dukungan untuk memberikan pelayanan secara prima di wilayah perbatasan, kolaborasi lainnya dilakukan juga operasi Intelijen bersama sebagai bentuk pertukaran informasi intelijen dan sinergitas antara petugas Balai POM di Sanggau dengan Bais TNI, Binda serta Satgas Pamantas dalam rangka pengawasan pemasukan obat dan makanan yang dilakukan di titik rawan dari jalur tidak resmi yang terbentang di Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Entikong.

6. Optimalisasi penggunaan platform media informasi dalam rangka pemberantasan hoaks dengan cara penyebaran informasi publik serta kinerja Balai POM di Kab. Sanggau

Masyarakat merupakan salah satu pilar yang mempunyai peran strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Masyarakat sebagai konsumen diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar secara mandiri dan ikut serta dalam upaya pemberantasan peredaran hoaks terkait Obat dan Makanan. Masyarakat juga dapat memberikan informasi terkait pelanggaran Obat dan Makanan melalui kanal pengaduan yang telah disediakan oleh Balai POM di Sanggau. Untuk itu, Balai POM di Sanggau melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan, yaitu dengan cara:

- a. Melakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi baik melalui media sosial, media elektronik, dan media cetak untuk meningkatkan jangkauan masyarakat akan informasi Obat dan Makanan Aman
- b. Mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran Obat dan Makanan yang terjadi di sekitar melalui layanan pengaduan Balai POM di Sanggau seperti media sosial, layanan

whatsapp ULPK, serta kanal SP4N Laporan!

- c. Menyusun materi informasi yang akurat, menarik, dan sesuai dengan trend yang berkembang di masyarakat.
- d. Menciptakan branding dan icon terkait informasi Obat dan Makanan yang dapat meninggalkan kesan pada masyarakat.

Dalam upaya pemberantasan hoaks dan peningkatan efektivitas penyebaran informasi publik, aspek gender juga memiliki peran penting yang perlu diperhatikan oleh Balai POM di Sanggau. Penggunaan platform media informasi seperti media sosial, situs web resmi, serta aplikasi komunikasi digital dirancang secara inklusif dan responsif gender, agar pesan yang disampaikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam optimalisasi penggunaan platform media informasi, Balai POM di Kabupaten Sanggau yang dapat

- Menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat secara adil dan efektif
- Meningkatkan literasi publik terhadap informasi yang benar tentang obat dan makanan
- Memperkuat upaya pemberantasan hoaks secara berkelanjutan melalui partisipasi aktif perempuan dan laki-laki sebagai mitra strategis.

7. Intensifikasi Penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum

Operasi penindakan dilakukan terhadap pelaku kejahatan Obat dan Makanan demi menjamin keamanan obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Operasi penindakan dilakukan bersama stakeholder Korwas PPNS Polri untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan sebagai upaya terakhir/Ultimum Remedium. Dalam upaya memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, pendekatan yang responsif gender menjadi penting agar kegiatan penindakan, koordinasi, dan kemitraan dengan aparat penegak hukum tidak hanya berorientasi pada hasil hukum, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan terutama perempuan dan anak. Balai POM di Sanggau perlu memastikan bahwa kegiatan penindakan dan pengawasan yang dilakukan memiliki komponen pengarusutamaan gender (PUG). memperkuat kemitraan dengan institusi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah sehingga dapat mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan. Selain itu, sinergi dengan segenap *Criminal Justice System/CJS* meliputi Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Rumah Tahanan Negara serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Sanggau diwujudkan untuk memastikan terlaksananya penyidikan yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta keadilan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat.

8. Intensifikasi sampling di lapangan dan pengujian untuk menggambarkan profil keamanan dan mutu produk yang beredar serta mendeteksi pelanggaran di bidang obat dan makanan

Sampling dan pengujian obat dan makanan menjadi bagian penting dari upaya untuk memastikan bahwa produk obat dan makanan yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan dengan mengakomodir sampling dan pengujian rutin serta kasus/insidentil/pengaduan. Dalam pelaksanaan aspek gender kegiatan pengawasan tidak hanya berfokus pada aspek teknis mutu dan keamanan produk, tetapi juga mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, peran, dan dampak terhadap laki-laki dan perempuan sebagai produsen, pedagang, dan konsumen, integrasi perspektif gender dalam kegiatan intensifikasi sampling dan pengujian membantu Balai POM di Sanggau untuk, menjamin bahwa seluruh proses pengawasan mempertimbangkan dampak yang adil bagi laki-laki dan perempuan, meningkatkan efektivitas deteksi dini pelanggaran dengan memahami pola konsumsi dan produksi berbasis gender, mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga keamanan serta mutu produk yang beredar. Langkah strategis ini memberikan gambaran profil keamanan dan mutu produk yang beredar, mendeteksi potensi pelanggaran atau produk yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku serta melindungi konsumen dari obat dan makanan yang tidak memenuhi standar. Hal ini juga menjadi bentuk pengawasan yang lebih proaktif dalam mengatasi peredaran produk yang berisiko dan tidak terjamin keamanannya. Hasil pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian akan menjadi data kajian dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi.

9. Optimalisasi penerapan Reformasi Birokrasi dan tersertifikasi QMS ISO 9001 : 2015 menuju wilayah zona integritas mendukung kepercayaan publik terhadap kinerja BPOM

Tujuan utama dalam Penerapan reformasi birokrasi dan QMS ISO 9001:2015 di Balai POM Sanggau dalam menciptakan dan mewujudkan tata kelola dan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Penerapan Reformasi Birokrasi dan QMS ISO 9001:2015 dalam ruang lingkup kinerja yang mendukung penyederhanaan prosedur proses pelayanan publik, pengembangan kompetensi pegawai, peningkatan sistem pelaporan dan pengawasan yang lebih baik, serta pengembangan sistem manajemen yang berkualitas yang diterapkan secara efektif dan sesuai standar. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penerapan Reformasi Birokrasi (RB) dan sertifikasi Quality Management System (QMS) ISO 9001:2015, penting bagi Balai POM Sanggau untuk mengintegrasikan perspektif gender agar proses birokrasi, pelayanan publik, dan peningkatan mutu lembaga berjalan inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk memastikan bahwa kebijakan, pelayanan, dan lingkungan kerja Balai POM di Sanggau bebas dari bias gender. Integrasi aspek gender dalam pelaksanaan RB dapat diwujudkan melalui, Analisis Gender (Gender Analysis Pathway/GAP) dalam setiap area perubahan Reformasi Birokrasi, khususnya pada aspek manajemen SDM aparatur, pelayanan

publik, dan tata laksana organisasi Penerapan prinsip kesetaraan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam promosi jabatan, pelatihan, serta penugasan lapangan, Pembentukan lingkungan kerja yang aman dan mendukung kesetaraan gender, bebas dari pelecehan, diskriminasi, atau kekerasan berbasis gender, dengan demikian, Reformasi Birokrasi BPOM tidak hanya menghasilkan sistem kerja yang efektif, tetapi juga adil dan berkeadilan gender.

Adapun langkah utama yang dapat diterapkan dalam reformasi birokrasi di lingkungan Balai POM antara lain:

- Manajemen perubahan
- Penataan tata laksana
- Penataan SDM aparatur
- Penguatan akuntabilitas
- Penguatan pengawasan
- Peningkatan kualitas pelayanan publik

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) dalam ruang lingkup Balai POM Sanggau yang terus berkomitmen dalam pelaksanaannya melalui pendekatan beberapa aspek, seperti sistem manajemen mutu, pendekatan stakeholder, serta audit internal.

Hal-hal tersebut yang dapat meyakinkan publik bahwa Balai POM Sanggau berkomitmen untuk menjalankan reformasi birokrasi secara efektif, meningkatkan kualitas layanan melalui sertifikasi ISO 9001:2015, serta penerapan zona integritas yang mendukung kepercayaan publik terhadap kinerjanya.

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi BPOM tahun 2025-2029, Balai POM di Sanggau mengimplementasikan tugas fungsinya melalui sinergi antara pelaksanaan teknis Pengawasan Obat dan Makanan serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang andal. Pengawasan teknis dijalankan secara komprehensif mencakup kontrol pre-market dan post-market terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk pengawalan khusus terhadap mutu dan keamanan Program Makan Bergizi Gratis di mana fungsi pre-market dilaksanakan secara spesifik pada lingkup kewenangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) tanpa memasuki ranah penyusunan standar regulasi. Strategi pengendalian risiko ini diperkaya dengan pendekatan preventif yang humanis melalui pemberian layanan informasi dan edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan advokasi dan kerja sama lintas sektor guna membangun ekosistem pengawasan yang partisipatif di daerah. Di sisi lain, keberhasilan tugas teknis tersebut ditopang oleh manajemen internal yang kokoh, di mana Balai POM di Sanggau tidak hanya fokus pada output pengawasan, melainkan juga berkomitmen mengelola sumber daya dan administrasi secara optimal demi mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM yang berintegritas dan berkinerja tinggi. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM di Sanggau dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan
2. Pemeriksaan sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan

Makanan

3. Melaksanakan sampling dan pengawasan label Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan
4. Melaksanakan pengawasan iklan/promosi Obat dan Makanan
5. Melaksanakan kegiatan investigasi dan intelijen Obat dan Makanan
6. Melaksanakan penyidikan di bidang Obat dan Makanan
7. Melaksanakan sertifikasi dan layanan publik
8. Melaksanakan KIE Obat dan Makanan
9. Memberikan layanan sarana dan prasarana internal
10. Memberikan dukungan manajemen untuk satuan kerja
11. Memberikan layanan perkantoran
12. Melaksanakan penguatan kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi, misi, dan tujuan Badan POM yang telah ditetapkan, maka disusunlah matriks target kinerja Balai POM di Sanggau yang mendukung pencapaian tersebut, sebanyak 8 (delapan) sasaran kegiatan dengan 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan target kinerja.

Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai POM di Sanggau selama periode lima tahun ke depan.

Tabel 8. Matriks Target Kinerja Balai POM di Sanggau 2025-2029

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91	92	93	94
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	27	28	29	30
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100
		Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	87	88	89	90

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase Sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	95	95.5	96	96.5	97
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	88	89	90	91
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	93	95	97	100
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	94	95	96	96,75

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92	93,4	94,8	95,8	96,4
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	92	93	94	95
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12	8,7	9,3	10	10,7
		Persentase kabupaten/ kota yang didampingi dalam Pencapaian kabupaten/ kota pangan aman	20	40	60	80	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81	82	83	84
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,13	89,01	89,89	90,77	91,65
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	2	2	3	3
		Jumlah desa pangan aman	1	1	2	3	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	11,11	25,93	44,44	70,37	100
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96	97	98	99	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
5	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51	4,55	4,6	4,65	4,7
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	76	77	78	79	80
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,85	2,88	2,92	2,95	3
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100	-	-	-	-
		Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	75	75,16	75,33	75,49

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 9. Kerangka Pendanaan Balai POM di Sanggau 2025-2029

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.747	1.921	2.114	2.325	2.557
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.401	2.844	3.361.	3.390.	4.556
Total	4.148	4.766	5.475	6.255	7.114

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan Balai POM di Sanggau dalam kurun waktu 2025-2029 serta dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strate Balai POM di Sanggau yang ingin dicapai. Pada akhir 2025-2029, Balai POM di Sanggau diharapkan mampu:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan bersama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE guna mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu melalui program yang telah direncanakan.
3. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan anan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM melalui berbagai kegiatan pembinaan/regulatory assistance yang diberikan kepada pelaku usaha.
4. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penyelenggaraan fungsi deteksi kejahatan dan penyidikan yang optimal.
5. Mewujudkan Balai POM di Sanggau sebagai organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta memberikan layanan publik yang prima.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada Renstra Badan POM 2025-2029, adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dinamika lingkungan strategis lainnya, menuntut Balai POM di Sanggau melakukan perubahan untuk lebih meningkatkan kinerja. Balai POM di Sanggau dibentuk untuk mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat pada wilayah kerja Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Pemetaan sasaran kegiatan, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *analisis SWOT* yang merupakan *performance management tools* yang mampu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, sehingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

Rencana strategis Balai POM di Sanggau Tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Sanggau untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan daripada pelaksanaan Renstra tahun 2025-2029 itu sendiri sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber pendanaannya, serta komitmen yang dijaga secara konsisten oleh pimpinan dan staf. Rencana strategis Balai POM di Sanggau Tahun 2025-2029 menjadi acuan kerja agar senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja unit kerja sampai pada level individu.

LAMPIRAN 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Sanggau Tahun 2025-2029

Kegiat an	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rin cian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Sanggau								4.148	4.776	5.475	6.255	7.114	UPT BPOM	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								1.747	1.921	2.114	2.325	2.557	UPT BPOM	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												UPT BPOM	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Sanggau	90	91	92	93	94						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		0	27	28	29	30						UPT BPOM
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86	87	88	89	90						UPT BPOM
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100						UPT BPOM
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95						UPT BPOM

	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		95	95,5	96	96,5	97						UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87	88	89	90	91						UPT BPOM
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	93	95	97	100						UPT BPOM
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93	94	95	96	96,75						UPT BPOM
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95						UPT BPOM
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		92	93,4	94,8	95,8	96,4						UPT BPOM

12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		91	92	93	94	95						UPT BPOM
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100	100	100	100	100						UPT BPOM
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		12	8,7	9,3	10	10,7						UPT BPOM
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		20	40	60	80	100						UPT BPOM
16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	81	82	83	84						UPT BPOM
RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			0	40	40	40	40						UPT BPOM

	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		138	138	138	138	138						UPT BPOM
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		223	227	240	250	265						UPT BPOM
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		11	12	13	14	15						UPT BPOM
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		157	182	198	214	231						UPT BPOM
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		11	84	144	144	144						UPT BPOM
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		0	0	0	0	0						UPT BPOM
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		1	0	0	0	0						UPT BPOM
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		0	0	0	0	0						UPT BPOM
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		0	339	339	339	339						UPT BPOM

	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi			0	0	0	0	0						UPT BPOM
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	0	0	0	0						UPT BPOM
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			0	0	0	0	0						UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas KIE			0	0	0	0	0						UPT BPOM
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		88,13	89,01	89,89	90,77	91,65						UPT BPOM
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		2	2	2	2	2						UPT BPOM
	3	Jumlah desa pangan aman		1	1	2	3	3						UPT BPOM
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			95	320	384	461	553						UPT BPOM, Dit. PMPU OTSKK, & Dit. PMPU Pangan Olahan

	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		21	8	9	10	11						UPT BPOM
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		2	2	2	3	3						UPT BPOM
	RO 4: Desa Pangan Aman		1	1	2	3	3						UPT BPOM
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		1	1	1	1	1						UPT BPOM
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu		0	0	0	0	0						UPT BPOM
	1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		11,11	25,93	44,44	70,37	100						UPT BPOM
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		3	4	5	7	8						UPT BPOM
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		0	0	0	0	0						UPT BPOM

	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		96	97	98	99	100						UPT BPOM
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan			1	1	1	1	2						UPT BPOM
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT			0	0	0	0	0						UPT BPOM
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90	91	92	93	94						UPT BPOM
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			14	14	15	15	15						UPT BPOM
	Layanan Publik UPT yang prima			0	0	0	0	0						UPT BPOM
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT		4,51	4,55	4,6	4,65	4,7						UPT BPOM
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			3	17	18	18	19						UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal			0	0	0	0	0						UPT BPOM

	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		0	75	75.16	75.33	75.49						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	2	Nilai AKIP UPT BPOM		76	77	78	79	80						UPT BPOM
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		5	5	5	5	5						UPT BPOM
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		2,85	2,88	2,92	2,95	3						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT		100	0	0	0	0						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	6	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar		0	0	0	0	0						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	7	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT		0	0	0	0	0						UPT BPOM
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			1	0	0	0	0						UPT BPOM dan Deputi 1,2,3,4
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			1	0	0	0	0						UPT BPOM

	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		10	0	0	0	0						UPT BPOM
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								2.401	2.844	3.361	3.390	4.556	UPT BPOM
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	0	0	0	0						UPT BPOM
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	0	0	0	0						UPT BPOM